

PENGARUH KARAKTERISTIK INSPEKTORAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

**NUR AINI KUSUMANINGRUM¹
SUTARYO
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS**

ABSTRACT

This study discusses about performance of local governments. This study aims to examine the effect of characteristics of the implementation inspectorate local government regency/city in Indonesia. The sample used in this study were 194 local government performance regency/city in Indonesia for the year 2012. The source of data in this study uses softcopy of data on the number and level of the role of auditor and score of the Internal Audit Capability Model (IA-CM) obtained from BPK RI. In addition, other data required is total assets of local government regency/city in Indonesia which is obtained from the Local Government Finance Report. This study uses multiple regression model.

The results showed evidence that the number of auditors and the role of the expert auditor level affect positively on the performance of local government administration. This study shows the test results of a relatively small coefficient determination, which means this study is more influenced by variables in the outside the research that affect the performance of the organization local governments. One of the limitations that exist in this study is unpublished data so that access is limited.

Keyword : local government's performance, inspectorate local government, internal auditor, accountability, IA-CM

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kinerja pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik inspektorat daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 194 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012. Sumber data pada penelitian ini berupa data *softcopy* mengenai jumlah dan jenjang peran auditor serta skor Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang diperoleh dari BPK RI. Selain itu, data lain yang dibutuhkan adalah total aset yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (*multiple regression model*).

Hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa jumlah auditor dan jenjang peran sebagai auditor ahli berpengaruh secara positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Di samping itu, level kapasitas inspektorat daerah di Indonesia tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan hasil uji koefisien determinasi *relative* kecil yang berarti penelitian ini lebih banyak dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah data yang tidak dipublikasikan sehingga aksesnya terbatas.

Kata Kunci : Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, inspektorat daerah, internal auditor, akuntabilitas, IA-CM

A. PENDAHULUAN

Era otonomi memberi kewenangan pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah menimbang bahwa sistem pemerintahan di

Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Setiap daerah di Indonesia memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahannya khususnya dalam hal keuangan.

Sesuai dengan tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur alokasi segala sumber daya yang ada secara mandiri. Wewenang tersebut berkaitan dengan penerimaan sumber dana yang harus diatur dengan baik. Pemerintah daerah juga berwenang mengelola keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan wewenang tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya pada negara.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah diwujudkan dalam akuntabilitas keuangan guna mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya akuntabilitas pada Pemerintah Daerah berhubungan dengan pemberian informasi secara transparan kepada publik untuk memenuhi haknya. Informasi yang disampaikan menunjukkan bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah daerah itu sendiri. Informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

LPPD nantinya akan dievaluasi oleh Kemendagri setiap tahunnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Namun, evaluasi yang dilakukan pemerintah dinilai masih lemah. Salah satu masalahnya adalah pengalokasian dana yang kurang tepat oleh pemerintah daerah (www.okezone.com).

Permasalahan yang ada dapat diminimalisasi dengan adanya pengawasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 pasal 49 ayat 2 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sementara itu, Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian peran BPKP serta Inspektorat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diharapkan.

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2007, Inspektorat Daerah kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah kabupaten/kota bertanggungjawab dan berkedudukan di bawah pemerintahan bupati/walikota. Dengan demikian, jika peran dan fungsi tersebut dapat dipenuhi dengan baik maka kinerja pemerintah daerah juga menjadi baik. Aikins (2011) menunjukkan bahwa kinerja auditor berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan pengendalian internal dan efisiensi.

Tahun 2012, pemerintah daerah di Indonesia yang mendapat peringkat rendah ada 23 pemerintah daerah kabupaten/kota atau sebesar 4,96%. Padahal, tahun-tahun sebelumnya hanya 5 sampai 6 pemerintah daerah atau sekitar 1%, bahkan pada tahun 2011 tidak ada pemerintah daerah yang memiliki peringkat rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah yang berkinerja sedang cenderung meningkat sedangkan yang berkinerja tinggi cenderung turun. Setiap tahun pemerintah daerah di Indonesia berusaha untuk mencapai tingkat atau peringkat yang diharapkan yaitu peringkat tinggi hingga sangat tinggi. Peringkat dan status kinerja pada tahun 2009-2012 tersebut dijelaskan dalam Gambar 1 berikut ini.

INSERT GAMBAR 1

Adanya pemerintah daerah kabupaten/kota yang masih mendapat peringkat rendah, menandakan bahwa masih terdapat permasalahan terkait kinerja pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Faktor yang digunakan adalah karakteristik internal auditor pemerintah sebagai pengawas internal pemerintah dengan tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan, asistensi dan pelaksanaan operasional pemerintah daerah dengan harapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dioptimalkan.

Kinerja pemerintah telah menjadi fokus dalam beberapa penelitian sebelumnya. Hubungan antara internal auditor dan kinerja pemerintah telah dikembangkan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Aikins (2011) menyatakan bahwa kecukupan pengendalian internal dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Aikins (2011) mengungkapkan bahwa internal auditor pemerintah daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan melalui peningkatan pengendalian internal atas proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Bourdeaux dan Grace (2008) mengungkapkan bahwa dibalik kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengawasan baik oleh badan legislatif maupun badan eksekutif daerah. Arifianti *et. al* (2013) memperkuat bukti penelitian sebelumnya bahwa pengawasan baik oleh masyarakat dan BPK berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan karakteristik internal auditor sebagai faktor yang diduga berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penggunaan internal auditor sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja didasari bahwa kinerja pemerintah merupakan hasil dari proses pelaksanaan operasional pemerintah yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh internal auditor/inspektorat daerah. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penelitian sebelumnya yang telah disebutkan tidak menggunakan karakteristik dari pengawas internal sebagai faktor pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sementara sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2007 yang mengatur mengenai inspektorat daerah bahwa fungsi inspektorat daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Tujuannya agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin baik.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Teori Agensi

Suatu organisasi pastinya ingin mencapai suatu tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi merupakan sebuah kontrak yang muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa sekaligus memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Di dalam pemerintah daerah, teori ini dapat digambarkan seperti kepala daerah sebagai *agent* dan rakyat sebagai *principal*. Hubungan pendelegasian wewenang dalam pemerintah daerah yang dapat terwujud seperti antara masyarakat/*principal* dengan pemerintah daerah/*agent*, legislatif/*principal* dengan pemerintah daerah/*agent*, dan juga antara masyarakat/*principal* dengan legislatif/*agent* (Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013)

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) merupakan capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Penyelenggaraan pemerintah daerah akan dievaluasi dalam bentuk laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Selanjutnya, laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). EKPPD kabupaten/kota dilakukan setiap tahun oleh tim nasional EPPD dan laporannya diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi, EKPPD dilakukan secara tahunan, kemudian penetapan peringkat dan status diterbitkan 2 tahun setelah EKPPD dilakukan. Penetapan peringkat dan status yang diberikan terdiri dari 4 tingkatan, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

3. Karakteristik Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor)

dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins, 2011).

a. Ukuran (*Size*) Internal auditor Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)

Dalam pemerintah daerah, internal auditor merupakan jabatan yang memiliki kontribusi penting seperti tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pada internal pemerintah daerah. Ukuran auditor internal meliputi empat faktor penentu, yaitu: karakteristik komite audit, karakteristik dan misi audit internal, kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh pihak lain, dan karakteristik organisasi. (Anderson *et. al*, 2012)

Ukuran (*Size*) dalam pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda. Semakin banyak internal auditor maka semakin beragam pemikiran yang membuat aktivitas pengawasan kinerja pemerintah daerah semakin baik. *Size*/ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah internal auditor di setiap inspektorat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Aikins (2011), menunjukkan auditor internal pemerintah daerah memainkan peran penting dalam manajemen keuangan publik dan operasi pemerintah. Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa audit di daerah masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Logikanya dengan adanya internal auditor yang dimiliki setiap inspektorat daerah berpengaruh terhadap hasil audit pemerintah daerah yang juga berkontribusi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki internal auditor akan memiliki kinerja yang baik. Dengan adanya internal auditor, fungsi pengawasan menjadi semakin baik sehingga kinerja pemerintah daerah dinilai tinggi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁ : *Size* internal auditor pemerintah daerah (inspektorat daerah) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

b. Jenjang Internal auditor Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan pengawas atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut berarti bahwa inspektorat daerah merupakan aparat pengawas intern pemerintah pada tingkat daerah. Auditor memiliki jenjang jabatan yang dibagi dalam bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan auditor disebut juga Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang merupakan jabatan fungsional yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi pengawasan instansi pemerintah/aparat pengawasan instansi pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri (Peraturan Menteri PAN 220/2008). Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa jenjang auditor ahli lebih tinggi daripada jenjang auditor terampil.

Jenjang internal auditor pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi jenjang auditor ahli yang ada dalam setiap inspektorat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bamber, Jiang, dan Wang (2010) menjelaskan bahwa jenjang pendidikan yang tinggi khususnya dengan gelar M.B.A para manajer berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal itu dikarenakan pengetahuan lebih yang dimiliki oleh manajer yang dapat mempengaruhi keputusannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tingkat atau strata seseorang dapat mempengaruhi kinerja orang tersebut.

Dalam hal ini maka jenjang auditor ahli dapat mempengaruhi penilaian auditor sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam Permen PAN 220/2008 menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok auditor adalah melakukan audit kinerja. Logikanya, jika internal auditor pada setiap pemerintah daerah memiliki jenjang jabatan yang tinggi maka hasil audit pemerintah daerah akan semakin baik karena fungsi pengawasan auditor yang berjalan dengan benar. Hal tersebut didukung dengan adanya pengetahuan dan pengalaman lebih yang dimiliki auditor tersebut akan mempengaruhi keputusan auditor. Fungsi pengawasan auditor ahli yang baik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai semakin tinggi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂ : Jenjang internal auditor pemerintah daerah (inspektorat daerah) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

c. Kapasitas Internal auditor Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)

Sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER – 1633 /K/JF/2011, Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Pihak yang menjadi tim penilai adalah BPKP yang melakukan pengawasan berdasarkan *Institute of Internal Auditors (IIA)*. Level penilaian menurut IA-CM, yaitu: level 1 adalah *initial*, level 2 adalah *infrastructure*, level 3 adalah *Integrated*, level 4 adalah *managed*, dan level 5 adalah *optimizing*. Tingkatan tersebut menunjukkan bahwa jika level inspektorat daerah semakin mendekati level 5, maka kapabilitas inspektorat daerah semakin baik.

Kapasitas internal auditor yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Kapabilitas Pengawasan Intern (IA-CM) berupa tingkatan level 1-5 yang didapatkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil penelitian Aikins (2011) dari *survey* penelitian yang dilakukan adalah kecukupan pengendalian internal memiliki rata-rata pada skala 3-5 yang artinya pengendalian internal menunjukkan tingkat kecukupan yang “cukup memadai”, “memadai”, dan “sangat memadai”. Sementara itu, hasil efektivitas pengendalian internal menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki rata-rata pada skala 3-5 yang berarti pengendalian internal memiliki tingkat efektivitas yang “cukup efektif”, “efektif”, dan “sangat efektif”. Hasil *survey* tersebut dinilai cukup tinggi dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan.

Berdasarkan penelitian Aikins (2011), semakin tinggi capaian level penilaian maka akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Model IA-CM merupakan suatu kerangka kerja untuk mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan dalam pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Logikanya dengan level tinggi yang dicapai inspektorat daerah akan menunjukkan kemampuan yang tinggi pula sehingga fungsi pengawasan menjadi efektif dan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃ : Kapasitas internal auditor pemerintah daerah (inspektorat daerah) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

4. Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri yang terdapat pada pemerintah itu sendiri yang dapat membedakan antar pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Pada dasarnya pemerintah daerah bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran yang besar suatu pemerintah daerah akan menunjang kegiatan operasional pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika kegiatan operasional dapat ditunjang dengan baik, maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun, daerah yang memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula dalam melaporkan kinerjanya kepada publik. Sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah, maka semakin besar tuntutan masyarakat dalam kinerja yang lebih baik.

C. METODA PENELITIAN

1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji hipotesis yaitu menjelaskan sifat hubungan-hubungan tertentu atau menetapkan perbedaan-perbedaan antara beberapa faktor independen dalam sebuah situasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2012. Sampel utama penelitian ini adalah data penilaian APIP terhadap pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2012, Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dan hasil pemilihan sampel penelitian ini tersaji dalam Tabel 1 berikut ini.

INSERT TABEL 1

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006). Sumber data penelitian ini terdiri dari Status Dan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dipublikasi dalam SK Mendagri Nomor 120-251 Tahun 2014, data unit APIP yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor dan data hasil tingkat/level tata kelola APIP daerah tahun 2012 yang diperoleh dari data BPKP.

3. Definisi Operasional Variabel

Secara lengkap, variabel dan pengukurannya disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

INSERT TABEL 2

a. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi faktor utama yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) merupakan capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak (Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008).

Pengukuran EKPPD dapat dilihat dari skor peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Skor/peringkat dan status kinerja yang diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) berdasarkan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun 2012. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ada 4, yaitu: sangat tinggi dengan skor $\geq 3,0$, tinggi dengan skor $\geq 2,0$, sedang dengan skor $\geq 1,0$, dan rendah dengan skor $\geq 0,0$.

b. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan variabel

independen karakteristik internal auditor pemerintah daerah (inspektorat daerah), yaitu ukuran internal auditor, jenjang internal auditor, dan kapasitas inspektorat daerah.

c. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sekaran, 2006). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah.

Size/ukuran pemerintah daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Penelitian ini menggunakan total aset sebagai ukuran pemerintah daerah. Mustikarini dan Fitriyani (2012), Sumarjo (2010), serta Arifianti, Payamta, dan Sutaryo (2013) juga menggunakan total aset untuk mendefinisikan ukuran pemerintah daerah diukur dari jumlah total aset yang dimiliki. Total aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat menggambarkan besarnya pemerintah daerah tersebut.

d. Metoda Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (*multiple regression model*) karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Pengujian ini menggunakan program SPSS sebagai alat bantu pengujian. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut ini.

$$\text{EKPPD} = \alpha + \beta_1\text{SIZE_IA} + \beta_2\text{AHLI} + \beta_3\text{KAPASITAS} + \beta_4\text{SIZE_PD} + \varepsilon$$

Keterangan:

EKPPD	: Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_4$: Koefisien regresi
ε	: <i>Standar error</i>
SIZE_IA	: Ukuran/jumlah internal auditor
AHLI	: Jumlah auditor jenjang ahli dibagi total auditor
KAPASITAS	: Kapasitas inspektorat daerah
SIZE_PD	: Total aset pemerintah daerah

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan deskripsi data yang dilikat dari rata-rata, standar deviasi, *variance*, maksimum, minimum, kurtosis, *skewness* (ketidaksesuaian distribusi) (Ghozali, 2009). Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali, 2009). Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3 berikut ini.

INSERT TABEL 3

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas data dibuktikan dengan kriteria data terdistribusi normal adalah jika *Asymp. Sig.* pada output uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 5% atau 0,05 (output *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05). Pada tabel 4, *Asymp. Sig.* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,079. Hal tersebut berarti bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal dan dapat digunakan untuk pengujian model regresi berganda. Hasil uji normalitas pada tabel 4 menunjukkan bahwa data variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal seperti berikut ini.

INSERT TABEL 4

b. Uji Heteroskedastisitas

Kriteria data tidak mengalami heteroskedastisitas adalah jika *Asymp. Sig.* masing-masing variabel pada output uji *Glejser* lebih besar dari 5% atau 0,05 (output *Glejser* > 0,05) dan sebaliknya. Pada tabel 5, *Asymp.Sig.* SIZE_IA sebesar 0.057, *Asymp.Sig.*AHLI sebesar 0.061, dan *Asymp.Sig.*KAPASITAS sebesar 0.144 serta *Asymp.Sig.* SIZE_PD sebagai variabel kontrol sebesar 0.116. Hal tersebut menunjukkan seluruh variabel independen dan variabel kontrol menunjukkan *Asymp.Sig.*> 0.05, yang berarti data tidak mengalami heteroskedastisitas.

INSERT TABEL 5

c. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 6, nilai *tolerance* untuk SIZE_IA sebesar 0.931, AHLI sebesar 0.999, dan KAPASITAS sebesar 0.994 dan SIZE_PD sebesar 0.934. Dengan demikian, seluruh variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 10% yang berarti masuk dalam kriteria data tidak mengalami multikolinieritas. Nilai VIF yang sesuai dengan kriteria data tidak mengalami multikolinieritas ditunjukkan dari nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Nilai VIF untuk SIZE_IA sebesar 1.075, AHLI sebesar 1.001, dan KAPASITAS sebesar 1.006 dan SIZE_PD sebagai variabel kontrol sebesar 1.071. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan gejala multikolinieritas atau dengan kata lain, seluruh variabel dalam penelitian terjadi homokedastisitas

INSERT TABEL 6

d. Uji Signifikansi-F

Kriteria yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi dalam penelitian ini adalah menggunakan *probability value (sig)*. Model regresi dinyatakan layak jika *sig.* lebih kecil dari 0,05 (*sig.*< 0,05), begitu juga sebaliknya jika *sig.* lebih besar dari 0,05 (*sig.*> 0,05) maka model regresi dinyatakan tidak layak. Berdasarkan tabel 7, model regresi pada penelitian ini menunjukkan angka 0,000 yang berarti memenuhi kriteria model regresi layak. Uji signifikansi-F dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi atau menentukan *good of fit test* dalam analisis hipotesis pada penelitian ini. Hasil uji signifikansi-F ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 7

e. Uji Signifikansi-t

Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika *sig.* lebih kecil dari 5% (*sig.*< 0,05), begitu juga sebaliknya jika *sig.* lebih besar dari 5% (*sig.*> 0,05) maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel SIZE_IA memiliki *sig.* sebesar 0.035, variabel AHLI memiliki *sig.* sebesar 0.022 dan variabel kontrol SIZE_PD memiliki

sig. sebesar 0.000. Hal tersebut berarti, variabel SIZE_IA, AHLI, SIZE_PD berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Di samping itu, variabel KAPASITAS memiliki *sig.* sebesar 0.471 yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji signifikansi-t ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 8

f. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* adalah 0,140 atau sebesar 14%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen berupa SIZE_IA, AHLI, KAPASITAS dan SIZE_PD mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 14% dan sisanya sebesar 86% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

INSERT TABEL 9

E. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia sebagai variabel dependen, karakteristik inspektorat daerah sebagai variabel independen, dan karakteristik pemerintah daerah yang diprosikan dalam ukuran pemerintah daerah sebagai variabel kontrol. Karakteristik inspektorat daerah dijelaskan dengan ukuran internal auditor, jenjang auditor, dan kapasitas inspektorat daerah. Hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama dan kedua dapat diterima. Sedangkan hipotesis ketiga ditolak.

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti ukuran internal auditor berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki jumlah auditor yang tinggi fungsi pengawasannya lebih baik karena semakin banyak internal auditor maka semakin beragam pemikiran yang membuat fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah semakin baik dan berpengaruh terhadap hasil audit pemerintah daerah. Hasil tersebut juga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa jenjang internal auditor berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jenjang auditor ahli berpengaruh secara positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan jika jumlah auditor dengan jenjang ahli di inspektorat daerah mencukupi, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Jumlah internal auditor ahli dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah karena pengawasannya pun lebih baik sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya yang lebih.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal tersebut berarti kapasitas inspektorat daerah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Variabel tersebut tidak berpengaruh karena hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia simpulan capaian level IA-CM masih berada di level 1 sampai dengan level 2. Capaian level per-elemen pada inspektorat daerah masih belum mencapai level tinggi yaitu level 4 atau level 5. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa level rendah yang dicapai inspektorat daerah tidak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 8, ukuran pemerintah daerah sebagai variabel kontrol terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut berarti semakin besar ukuran daerah maka semakin tinggi skor kinerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Sumarjo (2010) yang juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh karakteristik inspektorat daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil analisis data mendasari simpulan bahwa inspektorat daerah dengan jumlah ukuran internal auditor yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena dengan jumlah auditor yang tinggi fungsi pengawasannya lebih baik. Hal tersebut berarti semakin banyak internal auditor maka semakin beragam pemikiran yang membuat

fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah semakin baik dan berpengaruh terhadap hasil audit pemerintah daerah. Hasil analisis data juga mendasari simpulan bahwa jenjang auditor ahli dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena jika jumlah auditor dengan jenjang ahli di inspektorat daerah mencukupi, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Di samping itu, kapasitas inspektorat daerah tidak dapat memberikan pengaruh secara positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena level rendah yang dicapai inspektorat daerah tidak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain adalah penelitian ini menggunakan sumber data yang sebagian besar berasal dari data Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), namun akses data IA-CM dan APIP tidak dipublikasikan sehingga terbatas aksesnya. Hal tersebut dapat mengurangi daya konfirmasi data penelitian. Kemudian keterbatasan lain adalah level kapabilitas cenderung mengelompok pada level 1 sehingga variansi data kecil. Hal tersebut berdampak dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dievaluasi secara tahunan, hanya saja penetapan status atau peringkat melalui Surat Keputusan kemendagri dilakukan dua tahun setelah dievaluasi. Hal ini tentunya dapat menjadikan data kinerja menjadi bias akibat jarak yang jauh antara evaluasi dengan hasil evaluasinya.

3. Saran dan Implikasi

Dengan adanya hasil simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini yang telah diungkapkan sebelumnya, maka terdapat saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan sumber data primer atau bisa dengan mengajukan kuesioner langsung kepada setiap masing-masing inspektorat daerah untuk menilai karakteristik inspektorat daerahnya sendiri. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran yang lain untuk mengukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan capaian kapasitas inspektorat daerah yang masih rendah, untuk selanjutnya pemerintah daerah dapat meningkatkan level kapabilitas inspektorat daerah sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER – 1633 /K/JF/2011. Selain itu, pemerintah daerah yang memiliki jumlah auditor yang cukup banyak, pemerintah daerah yang memiliki auditor ahli, dan

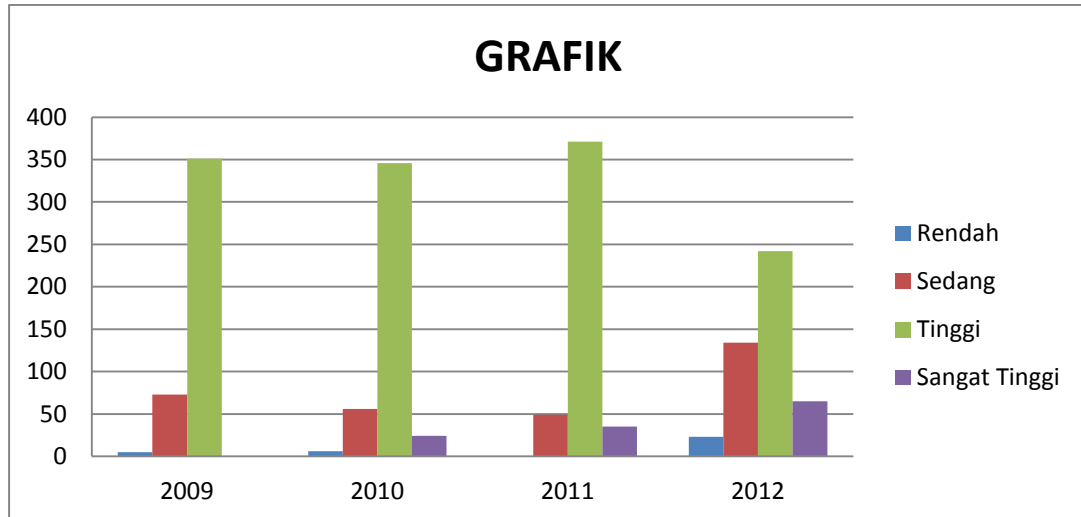
pemerintah daerah dengan total aset yang besar lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, Stephen K. 2011. An Examination of Government Internal Audits' Role in Improving Financial Performance. *Journal of Public Finance and Management*. Volume 11, Number 4, pp. 306-337
- Anderson *et. al.* 2012. A Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions. *Accounting Horizons*. Vol. 26, No. 2 pp. 167–191.
- Arifianti, Hermin., Payamta., dan Sutaryo. 2013. *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado. 25-28 September 2013.
- Bamber, L., J. Jiang, dan I. Wang. 2010. What's My Style? The Influence of Top Managers and Their Personal Backgrounds on Voluntary Corporate Financial Disclosure. *The Accounting Review* 85 (4): 1131–1162.
- Bourdeaux, Carolyn dan Grace Chikoto. 2008. Legislative Influence on Performance Management Reform. *Public Administration Review*. Vol. 68, No. 2, PP. 253-265.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hilmi, Amiruddin Z dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Jensen M.C., and Meckling W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3, pg. 305-360.
- Keputusan Mendagri Nomor 120-251 Tahun 2014 tentang *Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2012*
- Marfiana, Nandhya dan Kurniasih, Lulus. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Universitas Sebelas Maret.
- Mustikarini, W. A., dan Fitriyani, D. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Patrick, Patricia A. 2007. The Determinants of Organizational Innovativeness : The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Thesis. The Pennsylvania State University.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudarsana, Hafidh S dan Rahardjo, Shiddiq N. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-1.
- Sumarjo Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- www.wikipedia.org

LAMPIRAN

GAMBAR 1
Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional
Tahun 2009-2012



Sumber: Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor: 120-251 Tahun 2011-2014

TABEL 1
Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah kabupaten/kota kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2012	497
2.	Pemerintah kabupaten/kota yang status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tidak dinilai	(33)
3.	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki auditor ahli	(191)
4.	Pemerintah daerah yang tidak mencantumkan seluruh data yang dibutuhkan	(79)
	Jumlah sampel	194

TABEL 2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Nama	Akronim	Pengukuran
Variabel Dependen		
Kineja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	EKPPD	Skor berdasarkan Keputusan Kemendagri No. 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2012. Terdapat 4 status kinerja, yaitu sangat tinggi (skor $\geq 3,0$), tinggi (skor $\geq 2,0$), sedang (skor $\geq 1,0$), dan rendah (skor $\geq 0,0$)
Variabel Independen		
Ukuran internal auditor	SIZE_IA	Total jumlah auditor dari seluruh auditor pada semua jenjang
Jenjang internal auditor	AHLI	Jumlah auditor jenjang ahli dibagi total auditor.
Kapasitas internal auditor	KAPASITAS	Skor berdasarkan model IA-CM, terdapat pembagian kapabilitas auditor menjadi 5 level, yaitu Level 1 (<i>Initial</i>), Level 2 (<i>Infrastructure</i>), Level 3 (<i>Integrated</i>), Level 4 (<i>Managed</i>), dan Level 5 (<i>Optimizing</i>).
Variabel Kontrol		
Ukuran pemerintah daerah	Ln SIZE_PD	Logaritma natural total aset pemerintah daerah.

Sumber: Kemendagri tahun 2012, data unit APIP, BPKP tahun 2011, Marfiana dan Kurniasih (2012), Sumarjo (2010), Hilmi dan Martani (2012)

TABEL 3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
EKPPD	194	0.5291	3.3465	2.475067	0.5524626
SIZE_IA	194	1	129	20.69	19.113
AHLI	194	0.14	1.00	0.7297	0.24706
KAPASITAS	194	1.00	2.00	1.05	0.222
SIZE_PD	194	26.9242	34.4494	28.463769	0.8372201
Valid N (listwise)	194				

Keterangan: EKPPD = Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, SIZE_IA = Ukuran internal auditor, AHLI = Jenjang auditor ahli, KAPASITAS = Kapasitas inspektorat daerah, SIZE_PD = Ukuran pemerintah daerah

TABEL 4
Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
<i>N</i>		194
	<i>Mean</i>	0.0000000
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Std. Deviation</i>	0.51234912
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.091
	<i>Positive</i>	0.044
	<i>Negative</i>	-0.091
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.270
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.079
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data</i>		

TABEL 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	2.142	0.033
SIZE_IA	-1.916	0.057
AHLI	-1.887	0.061
KAPASITAS	1.467	0.144
SIZE_PD	-1.581	0.116

a. Dependent Variable: ABS_RES

Keterangan: SIZE_IA = Ukuran internal auditor, AHLI = Jenjang auditor ahli, KAPASITAS = Kapasitas inspektorat daerah, SIZE_PD = Ukuran pemerintah daerah

TABEL 6
Hasil Uji Multikolonieritas

<i>Variable</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
SIZE_IA	0.931	1.075
AHLI	0.999	1.001
KAPASITAS	0.994	1.006
SIZE_PD	0.934	1.071

Keterangan: SIZE_IA = Ukuran internal auditor, AHLI = Jenjang auditor ahli, KAPASITAS = Kapasitas inspektorat daerah, SIZE_PD = Ukuran pemerintah daerah

TABEL 7
Uji Signifikasi-F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	8.244	4	2.061	7.688	0.000 ^a
<i>Residual</i>	50.663	189	0.268		
<i>Total</i>	58.906	193			

a. *Predictors:* (Constant), SIZE_PD, KAPASITAS, AHLI, SIZE_IA
b. *Dependent Variable:* EKPPD

TABEL 8
Uji Signifikansi-t

<i>Model</i>	<i>Expectation sign</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	
1 (Constant)		-2.933	1.321		-2.221	0.028 ^b
SIZE_IA	+	0.004	0.002	0.148	2.121	0.035 ^b
AHLI	+	0.348	0.151	0.156	2.307	0.022 ^b
KAPASITAS	+	0.122	0.169	0.049	0.722	0.471
SIZE_PD	+	0.173	0.046	0.263	3.763	0.000 ^a

a. *Dependent Variable:* EKPPD

Keterangan :SIZE_IA = Ukuran internal auditor, AHLI = Jenjang auditor ahli, KAPASITAS = Kapasitas inspektorat daerah, SIZE_PD = Ukuran pemerintah daerah, EKPPD = Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Variabel Dependen: EKPPD

Signifikansi a = 1%

Signifikansi b = 5%

TABEL 9
Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0.374 ^a	0.140	0.122	0.5177424

a. *Predictors:* (Constant), SIZE_PD, KAPASITAS, AHLI, SIZE_IA
b. *Dependent Variable:* EKPPD